



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN
RASIO LIKUIDITAS, RASIO KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH, MODAL KERJA,
DAN SURPLUS/DEFISIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NIA AMELIJA SM
1615100306**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIALSAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Nia Amelija SM
NPM : 1615100306
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, RASIO
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, MODAL KERJA,
DAN SURPLUS/DEFISIT

MEDAN, 29 Juli 2020

KETUA PROGRAM STUDI


Junawan, SE., M.Si



PEMBIMBING I


Anggi Pratama Nasution st, SE., M.Si

PEMBIMBING II


Rahima br. Parba, SE., M.Si., Ak., CA



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI INI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : NIA AMELIA SM
N.P.M : 1615100306
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)

MEDAN, 29 JULI 2020

KETUA

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA I

Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si

ANGGOTA II

Rahima br. Parba, SE., M.Si., Ak., CA

ANGGOTA III

Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si

ANGGOTA IV


Oktarini Khumilah Siregar, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Amelija SM
NPM : 1615100306
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
JudulSkripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN RASIO LIKUIDITAS, RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, MODAL KERJA, DAN SURPLUS/DEFISIT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non- Eksklusif , mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuen siapa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Juli 2020



Nia Amelija SM
1615100306

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nia Amelija SM
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 September 1999
Npm : 1615100306
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. Palem III Blok F No.1 G Villa PalemKencana

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubung dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Nia Amelija SM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Nama yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Lengkap
Tempat/Tgl. Lahir
Nomor Pokok Mahasiswa
Program Studi
Konsentrasi
Jumlah Kredit yang telah dicapai
Nomor Hp
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

: NIA AMELIJA SM
: MEDAN / 13 September 1999
: 1615100306
: Akuntansi
: Akuntansi Sektor Publik
: 122 SKS, IPK 3.75
: 082277041190

No.	Judul
1.	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Rasio Kemandirian Sebagai Variabel Moderating

catatan : Disai Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Wakil Yang Tidak Perlu


Dekan
Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.

Medan, 16 Desember 2019
Pemohon,
(NIA AMELIJA SM)


Disahkan oleh
Dekan
Dr. Surya Huda, M.Hum.

Tanggal :
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Akuntansi
(Junarrah, SE., M.Si)

Tanggal : 18 Desember 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I
(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 19 Desember 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II
(Rahma br. Perba, SE., M.Si., Ak., CA.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Permohonan Meja Hijau

Medan, 18 Juli 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIA AMELIJA SM
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 1999-09-13
 Orang Tua : SUMARNO
 NIM : 1615100306
 Jurusan : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 Nomor IP : 082277041190
 Alamat : Jl. Palembang III block F nomor 1 G. Komplek Villa Palembang
 Kecamatan

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja dan Surplus/Defisit, untuknya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
 3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
 Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **M**

Disetujui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Nita, S.H., M.Hum.
 Fakultas SOSIAL SAINS



NIA AMELIJA SM
 1615100306

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 07/14/20 10:01:34

NIA AMELIA SM_1615100306_AKUNTANSI.docx | Document for Universitas Pembangunan Panca Budi_Licensee03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

View source chart



Quantitative chart



Top sources of plagiarism

- % 470** **words:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Jerancaman_dan_Jerantam_dari_Indonesia
- % 204** **words:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Jerancaman_dan_Jerantam_dari_Jawa_Timur
- % 133** **words:** https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Jerancaman_dan_Jerantam_dari_Sulawesi_Tenggara

[Show other Sources]

Progress of resources online

100% 0/1/2020 10:01:34

100% 0/1/2020 10:01:34

100% 0/1/2020 10:01:34


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 2448/PERP/BP/2020

perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: NIA AMELIJA SM
: 1615100306
semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Fakultas : Akuntansi

ini telah dihitung sejak tanggal 18 Juli 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Juli 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : NIA AMELIJA SM
NIM : 1615100306
Lahir/Tgl. : MEDAN / 1999-09-13
Alamat : Jl. Palem III block F nomor 1 G. Komplek Villa Palem Kencana
No. Telp : 082277041190
Orang tua : SUMARNO/NASRIDA
Bidang : SOSIAL SAINS
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja dan Surplus/Defisit

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Jika ada kesalahan data pada ijazah saya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam kesadaran. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 18 Juli 2020
Yang Membuat Pernyataan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasos@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu..... Tanggal, 29... Bulan, Juli..... Tahun, 2020....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi..... Semester Tahun Akademik Ganji / 2016..... bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : Nia Amelija SM
2. Npm : 1615100306
3. Program Studi : Akuntansi
4. Tanggal Ujian : 29 Juli 2020
5. Judul Skripsi Lama : Analisis Rasio Keuangan Untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara dengan Rasio Kemandirian Sebagai Variabel Moderating
6. Judul Skripsi Baru : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Model Kerja, dan Surplus/ Defisit.

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Junawan, SE., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA	
4	Anggota III/ Penguji I	Fitri Jari Panggabean, SE., M.Si	
5	Anggota IV/ Penguji II	Okarini Khamilah Siregar, SE, M.Si	



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. GatotSubroto Km. 4,5Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id
Medan – Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
DosenPembimbing I : Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si.
DosenPembimbing II : Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
NamaMahasiswa : Nia Amelija SM
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
NomorPokokMahasiswa : 1615100306
JenjangPendidikan : S1
JudulTugasAkhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahn Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, dan Surplus Defisit

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10 Mei 2020.	Perbaikan Materi Proposal.		
12 Mei 2020	Pengolahan Data		
21 Mei 2020	- Teknik penulisan dipelembici - Pengutipan kata-kata. - bersawilkan dgn Rumusan Masalah.		
27 Mei 2020.	Daftar Pustaka.		
10. Juni 2020	ACC Sidang.		

Medan.....

Diketahui oleh
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

Disetujui
Dosen Pembimbing II

Dr. Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.



4G 1 2 27% 10:14



Pak Anggi Dosen

online



O iya dengan hati yg ringan saya ACC
sidang skripsi ya

12:18

makaci bapak... 🙏

12:18 ✓✓



*Acc. given by
Rajap 3
[Signature]
04/08/2020*

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN
RASIO LIKUIDITAS, RASIO KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH, MODAL KERJA,
DAN SURPLUS/DEFISIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NIA AMELIJA SM
1615100306**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

Otonomi daerah dapat memberikan sebuah aksi bagi pemerintah daerah dimana aksi tersebut merupakan sebuah peluang maupun tantangan. Peluang dapat diartikan bagi pemerintah daerah yang memiliki tingginya potensi Sumber Daya Alam yang memadai untuk dapat dikelola sendiri, sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki rendahnya potensi Sumber Daya Alam merupakan menjadi sebuah tantangan. Akibatnya masalah yang selalu muncul pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan untuk pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 hingga 2019 dan tingkat kestabilan dalam mengelola sumber dayanya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 hingga 2019. Data akan dianalisis dengan menggunakan empat rasio keuangan yaitu : A. Rasio Likuiditas, B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, C. Modal Kerja, D. Surplus/Defisit. Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari: A. Rasio Likuiditas sangat besar untuk tiga tahun anggaran, namun terjadi ketidakstabilan pada 2 tahun anggaran B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah, C. Modal Kerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami ketidakstabilan yang disebabkan oleh menurun atau meningkatnya nilai modal kerja setiap periode D. Surplus/Defisit hasil analisa pada lima tahun anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa 2 tahun anggaran terjadi selisih kurang (defisit).

Kata Kunci : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, Surplus/Defisit.

ABSTRACT

Regional autonomy can provide an action for local governments where the action is both an opportunity and a challenge. Opportunities can be interpreted for local governments that have high natural resource potential that is adequate to be managed by themselves, while for local governments that have low natural resource potential is a challenge. As a result, the problem that always arises with regional governments in implementing regional autonomy is the ability to finance in order to carry out its function as a development organizer. The purpose of this study was to determine the financial performance of the North Sumatra Provincial Government from 2015 to 2019 and the level of stability in managing its resources. The data used in this study are the financial statements of the North Sumatra Provincial Government from 2015 to 2019. Data will be analyzed using four financial ratios, namely: A. Liquidity Ratio, B. Regional Financial Independence Ratio, C. Working Capital, D. Surplus / Deficit. The results of data analysis states that the financial performance of the North Sumatra Provincial Government when viewed from: A. Liquidity ratios are very large for the three fiscal years but instability occurs in the 2 fiscal years amounting B. Ratio of Regional Financial Independence for the Government of North Sumatra Province is still very low, the value of the independence ratio for 5 fiscal years is C. Working Capital at the Provincial Government of North Sumatra also experienced instability caused by a decrease or increase in the value of working capital each period D. Surplus / deficit analysis results in the five fiscal years of the North Sumatra Provincial Government shows that the 2 fiscal years there was a deficit.

Keywords : Analysis Of Local Government Financial Performance, Liquidity Ratios, Regional Financial Independence Ratios, Working Capital, Surpluses/Deficit.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
1.3. Perumusan Masalah	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Tujuan Penelitian	8
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah	13
2.1.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	15
2.1.4 Laporan Keuangan	17
2.1.5 Analisis Laporan Keuangan	19
2.1.6 Analisis Rasio Keuangan	21
2.1.7 Informasi Dalam Penilaian Kinerja	26
2.2. Penelitian Terdahulu	30
2.3. Kerangka Konseptual	34
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	36
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2.1 Lokasi Penelitian	36
3.2.2 Waktu Penelitian	36
3.3. Jenis dan Sumber Data	37
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
3.4.1 Definisi Operasional	38
3.4.2 Pengukuran Variabel	38

3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Teknik Analisa Data	41
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1 Deskripsi dan Karakteristik Wilayah	43
4.1.2 Hasil Analisis	60
4.2. Pembahasan	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
BIODATA	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, Dan Surplus/Defisit”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,M.M. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
3. Bapak Junawan, SE.,M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi
4. Bapak Anggi Pratama Nasution. SE., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing 1 (Satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya

5. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA. Selaku Dosen Pembimbing 2 (Dua) yang juga sudah banyak membantu untuk perbaikan sistematika penulisan skripsi saya
6. Ibu Nasrida Naski yaitu mama yang sangat saya cintai dan sayangi, beliau yang telah memberi dukungan serta doa
7. Kakak (Aftuny S.T dan Siti Hawa) dan Abang (Indra dan M. Azirul Amd.Kom) yang telah memberikan dukungan pada skripsi saya
8. Muhammad Arif Hidayat S.T yang InsyaAllah akan menjadi pendamping hidup saya, terimakasih telah memberikan banyak dukungan sampai akhirnya sidang meja hijau
9. Teman – teman seperjuangan stambuk 2016 yang telah memberikan dukungan dan saran untuk skripsi saya dan sahabat terbaik Tris Sintia Yolanda yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan ataupun isinya. Untuk ini, kritik dan saran sangat diharapkan untuk dapat melengkapi kesempurnaan isi skripsi ini.

Akhir dari skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dan mengharapkan semoga dalam skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis dan para pembaca.

Medan, 29 Juli 2020

Penulis

Nia Amelija SM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang terjadi pada Negara Indonesia memberikan banyak *Adjustment*. *Adjustment* merupakan sebuah perubahan yang timbul akibat terciptanya Otonomi Daerah. Seperti yang dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Sistem pengelolaan dalam pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami sebuah perubahan setelah terciptanya otonomi daerah. Perubahan yang dimaksud dalam sistem pengelolaan disini merupakan pemberian sebuah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur ataupun mengelola rumah tangganya sendiri dan dengan meminimaliskan bantuan dari pemerintah pusat.

Dengan begitu undang – undang yang terkait memberikan dasar penegasan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan wewenang untuk dapat menentukan kebutuhan baik dari alokasi sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tujuan dari terlaksana nya sebuah otonomi daerah agar pemerintah daerah dapat mencapai efisien, efektif, serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Otonomi daerah dapat memberikan sebuah aksi bagi pemerintah daerah dimana aksi tersebut merupakan sebuah peluang maupun tantangan. Peluang dapat diartikan bagi pemerintah daerah yang memiliki tingginya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai untuk dapat dikelola sendiri, sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki rendahnya potensi Sumber Daya Alam merupakan menjadi sebuah tantangan. Akibatnya masalah yang selalu muncul pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan untuk pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Hal tersebut tercantum pada ketentuan umum dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR- RI) maka Pemerintah menetapkan beberapa Undang – undang yang terkait dalam satu (1) paket pada bidang Keuangan Negara :

1. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang tersebut merupakan dasar bagi Institusi Negara sehingga dapat mengubah pola sebuah Administrasi Keuangan (*Financial Administration*) menjadi Pengelola Keuangan (*Financial Management*). Dapat dilihat berdasarkan Undang – Undang No. 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur /

Bupati / Walikota untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, yang meliputi:

1. Laporan Realisasi APBN/APBD;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Dilampiri laporan keuangan Negara/daerah dan badan lainnya;
6. Disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pemerintah melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara demi mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Sistem dan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Untuk dapat menilai kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah sehingga mampu membiayai setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai pihak yang diberi sebuah wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Untuk memberikan informasi yang relevan terkait posisi keuangan dan seluruh kegiatan transaksi maka laporan keuangan disusun berdasarkan suatu entitas pelaporan keuangan selama kurun waktu satu periode.

Tujuan diciptakan laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang bermanfaat dalam melaksanakan berbagai kegiatan operasional pemerintahan di daerah tersebut, menilai kondisi stabil atau tidaknya keuangan, sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dari segi efektivitas dan efisiensi serta menentukan ketaatannya suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan, setiap entitas mempunyai kewajiban untuk menyediakan sebuah laporan yang telah dilakukan dengan hasil yang dicapai untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi
5. Evaluasi kinerja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemerintah memiliki Prinsip dalam mewujudkan

sebuah Laporan Keuangan Pemerintah yang memenuhi standar diantaranya akuntabel dan transparansi. Dengan adanya transisi mengenai modifikasi basis kas belum berbasis akrual sehingga menimbulkan masa transisi dimana pencatatan suatu pelaporan dari single entry menjadi double entry, hal tersebut tertulis pada PP Nomor 24 Tahun 2005, sehingga pemerintah daerah dapat diperkenankan untuk menggunakan metode basis kas untuk lima tahun ke depan.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 24 Tahun 2005 maka Pemerintah menerbitkan sebuah peraturan tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah PP No. 71 tahun 2010 dimana Pemerintah Daerah mulai tahun 2011 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal tersebut menjadi era reformasi dalam perkembangan akuntansi sektor publik terkhusus pada akuntansi pemerintah di Negara Indonesia.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit – unit kerja didalamnya. Mahmudi (2010:87). Untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik merupakan fungsi utama laporan keuangan. Namun terdapat pihak yang masih belum memahami dalam membaca serta menilai dengan benar mengenai laporan keuangan.

Problematika yang terjadi dianggap wajar karena berbagai pihak yang berkepentingan tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda dan tidak memahami konsep akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), namun disisi lain akan memberikan dampak yang buruk karena laporan keuangan

merupakan sumber informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Halim (2014:267). Berikut dapat dilihat pada tabel 1.1 Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019.

Tabel 1.1
Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, RKKD, Modal Kerja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun	Rasio Likuiditas (X1)	RK KD (X2)	Modal Kerja (X3)	Surplus/Defisit Y
	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)
2015	1.09041469323256	1.36	14828365948405	375203376142209
2016	2.18874420194627	1	115459656871686	964195015857
2017	2.77324884361374	0.65	172682206980180	(284030223626)
2018	1.54432201534177	0.71	87020818170342	139671038225
2019	4.02479784128947	0.70	145223588917934	(360844313448)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah) 2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai likuiditas sangat besar seperti pada tahun 2019 nilai likuiditas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp. 4.02479784128947**. Begitu juga dengan nilai RKKD setiap tahunnya yang begitu rendah jika diukur dengan Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, jika **0% - 25%** dapat dikatakan Instruktif. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih

dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Reksohardiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82).

Begitu juga dengan nilai Modal Kerja yang setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan, dapat dilihat pada Tahun 2018 nilai Modal Kerja **Rp. 87.020.818.170342** sedangkan pada tahun 2019 nilai modal kerja **Rp. 145.223.588.917.934** artinya terjadi kenaikan pada nilai modal kerja pada tahun 2019. Berikut dengan nilai surplus/defisit yang mengalami ketidakstabilan bahkan minus pada tahun 2017 dan 2019.

Berdasarkan uraian fenomena yang dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, Dan Surplus/Defisit ”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang akan penulis paparkan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan nilai likuiditas setiap tahun pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2. Rendahnya nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari pola hubungan dan kemampuan tingkat daerah.
3. Nilai modal kerja yang mengalami ketidakstabilan setiap periode.

4. Nilai surplus/defisit yang mengalami defisit di tahun 2017 dan tahun 2019.

1.2.2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan yang dimiliki penulis, dan ketersediaan data oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini mengenai Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jika diukur berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, dan nilai Surplus/Defisit.

1.3. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dianalisis berdasarkan Rasio Likuiditas ?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dianalisis berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dianalisis berdasarkan nilai Modal Kerja ?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara jika dianalisis berdasarkan nilai Surplus/Defisit?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rasio Likuiditas.
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan nilai Modal Kerja.
4. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan nilai Surplus/Defisit.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis agar dapat memahami dan berfikir secara luas mengenai konsep akuntansi sektor publik terkhusus pada evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi sebagai suatu bahan untuk mengembangkan suatu pola fikir mengenai akuntansi khususnya bidang sektor publik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sangat diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi serta masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga

dapat melihat dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah melalui analisis rasio keuangan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi suatu bahan komparatif dan bahan kaji ulang yang relevan untuk penelitian dimasa yang akan datang serta menjadi sebuah bahan acuan bagi peneliti berikutnya mengenai kinerja keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Coriyati, 2019 dengan judul “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kineja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 - 2013”. Sedangkan Penelitian Ini Berjudul “ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, dan Surplus/Defisit”.

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X1) , Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X2), Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (X3), Rasio Belanja Modal (X4), Rasio Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah (X5), dan Rasio Pertumbuhan (X6), untuk menilai Kinerja Keuangan (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan Analisis Kinerja Keuangan menggunakan Rasio Likuiditas (X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), Modal Kerja (X3) dan Surplus/Defisit (Y).

2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019 sedangkan penelitian ini tahun 2020.
3. Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu di Kabupaten Sarolangun sedangkan penelitian ini di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Sampel : Sampel penelitian terdahulu menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten Salorangun tahun 2011 – 2013 sedangkan sampel penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 - 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011:10) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jansen dan Meckling dalam Siagian (2011:10) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing – masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat – cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer

menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar – besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. Manusia memiliki daya fikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajaer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

2. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Mohammad Mahsun (2012:25).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah, indicator kinerja pemerintah daerah wajib mencakup pengukuran kinerja keuangan. Indikator kinerja keuangan daerah Mohammad Mahsun (2012:196) meliputi :

- 1) Indikator Masukan (*Inputs*), seperti :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infrastruktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan
- 2) Indikator Proses (*Process*), seperti :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
 - b. Rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
- 3) Indikator Keluaran (*Output*), seperti :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*), seperti :
 - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5) Indikator manfaat (*Benefit*), seperti :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
- 6) Indicator *Impact*, seperti :
- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Mahsun (2012:135). Analisis rasio pada sektor pemerintah terkhusus pada APBD belum banyak dilakukan, karena itu teori belum ada secara mutlak mengenai nama dan kaidah pengukuran. Dengan begitu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan entitas swasta.

Menganalisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai yang dicapai antar satu periode dengan periode sebelumnya dan dapat diketahui peristiwa apa yang telah terjadi. Dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain dengan potensi daerahnya relatif sama dapat dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah dan terhadap pemerintah daerah lainnya. Pihak – pihak terkait yang berkepentingan pada rasio keuangan APBD ini yaitu : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Terdapat dua hal yang dapat dijadikan dasar indicator kinerja, antara lain kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrument yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrument yang dipakai oleh kepala daerah selaku manajer eksekutif.

Pentingnya indikator kinerja untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah analisis surplus/defisit APBD.

Analisis surplus/deficit APBD adalah satu tugas menteri keuangan dirjen perimbangan keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di perintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP)23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Hasil analisis akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun anggaran berikutnya.

Analisis difokuskan pada ketaatan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta komposisi penyebaran skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing – masing pemerintah daerah.

Dalam penentuan defisit terdapat pendekatan dasar pertama sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Adapun penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan analisis surplus/defisit.

Rumus yang digunakan untuk mengukur surplus/defisit APBD yaitu :

$$\text{Surplus / Defisit} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$$

4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan gambaran tentang neraca posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal dari satuan organisasi maupun perudahaan yang terjadi pada satu periode. Laporan keuangan ini diperlukan oleh pihak terkait seperti investor, pemberi pinjaman, pemasok, karyawan, kreditur usaha lainnya, pemerintah serta masyarakat yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan untuk kepentingan masing – masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode dan dapat dibuat secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Adapun untuk kepentingan pihak eksternal laporan keuangan dibuat secara tahunan.

Laporan keuangan tahunan meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Laba Ditahan, Dan Laporan Arus Kas. Dalam laporan keuangan terdapat dua macam informasi penting yang diperoleh para pemegang saham yaitu uraian, merupakan kata pengantar dari pucuk pimpinan perusahaan yang menggambarkan hasil usaha kegiatan perusahaan selama satu periode (satu tahun) yang lalu serta membahas perkembangan – perkembangan baru yang terjadi dan akan mempengaruhi kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang.

Tujuan dari laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi.

Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dibagi menjadi sektor privat, sektor publik, dan sektor nir laba. Terkhusus pada sektor publik dikenal adanya dua entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan yang mengelola anggaran, aset serta kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Sedangkan entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang – undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum terdiri dari :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masing – masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya.

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11), PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbaharui lagi melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tersebut adalah pada pemakaian basis pencatatan. Jika SAP tahun 2005 menggunakan basis kas modifikasi atau basis menuju akrual, yang penjelasannya adalah untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Pada SAP sesuai PP 71 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berkomitmen menggunakan basis akrual dalam setiap pencatatan keuangannya.

5. Analisis Laporan Keuangan

Menguraikan pos – pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau uang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap,1998) dalam Among Makarti 2014. Bagi organisasi privat analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi :

- a. Rasio likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek.
- b. Rasio Leverage yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur.
- c. Rasio Aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
- d. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya. Penggunaan analisis rasio keuangan pada sektor publik tidak begitu banyak dilakukan, secara teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Abdul Halim,2007) dalam Among Makarti 2014.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan walaupun kaidah akuntansi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki organisasi privat.

Bentuk dari analisis rasio keuangan sebagai berikut :

- a. Membandingkan nilai tiap – tiap pos aset dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

- b. Menghitung proporsi dan persentase masing –masing kelompok aset dengan total aset.
- c. Menghitung modal kerja yang dimiliki pemerintah daerah.
- d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset.
- e. Mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi dan prediksi.

6. Analisis Rasio Keuangan

- 1) Analisis Pertumbuhan (*Trend*) dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja keuangan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja. Analisis pertumbuhan atau tren dapat diaplikasikan misalnya untuk mencari nilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus/defiisit, dan sebagainya. Mahmudi (2016:91).
- 2) Analisis Proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terkaku kecil dari nilai yang wajar.
- 3) Analisis Modal Kerja (*Capital Working*) berfungsi untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Mahmudi (2016:107). Analisis modal kerja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

4) Analisis Rasio

a) Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memnuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya berdasarkan pada anggaran kas saja. Untuk melakukan analisis likuiditas ada beberapa rasio diantaranya :

(1) Rasio Lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman adalah 2 : 1. Namun angka tersebut tidaklah mutlak, sangat tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Tetapi nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1 : 1, jika kurang dari itu maka keuangan organisasi tidak lancar. Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

(2) Rasio Kas (*Cash Ratio*) membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diutangkan (investasi jangka pendek) dibagi dengan utang lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas dan efek yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio kas dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

- (3) Rasio Cepat (*Quick Ratio*) rasio cepat ini merupakan salah satu ukuran likuiditas yang terbaik, karena rasio ini cara cepat untuk mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini juga menunjukkan berapa alat likuiditas yang paling cepat yang biasa digunakan untuk melunasi utang lancar. Semakin tinggi nilai rasio cepat maka semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan.

Nilai yang dianggap baik untuk rasio cepat adalah 1 : 1.

Rasio cepat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Aktiva Lancar – Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

- (4) Rasio Modal Kerja Terhadap Aset Total (*Working Capital To Total Assets Ratio*) merupakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. Rasio modal kerja terhadap aset total dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Aktiva Lancar – Utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

- (5) Rasio Solvabilitas dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Solvabilitas dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

(6) Rasio Utang (*Leverage Ratio*) rasio utang sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Terdapat beberapa jenis rasio utang yang perlu diketahui, yaitu :

a) Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Total Debt To Equity Ratio*)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rumus rasio utang terhadap ekuitas :

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Jumlah Ekuitas Dana}}$$

b) Rasio Utang Terhadap Aset Modal (*Total Debt To Total Capital Assets*)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang. Aset modal dalam hal ini diprosikan dengan aset tetap.

Rumus rasio utang terhadap aset modal :

$$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset Modal}}$$

c) Rasio Bunga Utang Terhadap Pendapatan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan laba sebelum

bunga dan pajak bunga utang jangka panjang. Rumus rasio bunga utang terhadap pendapatan :

$$\frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Bunga Utang Jangka Panjang}}$$

(7) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Mahmudi (2016:140). Rumus rasio kemandirian keuangan daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Reksohardiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar – benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

7. Informasi Dalam Penilaian Kinerja

Informasi Finansial merupakan laporan kinerja finansial diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis varian antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

a. Varian Pendapatan

Varian pendapatan yaitu semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Pajak Daerah merupakan semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah atau pajak. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir.
 - b) Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi air, retribusi pertokoan, retribusi kelebihan muatan dan sebagainya yang berasal dari retribusi daerah.
 - c) Bagian laba usaha daerah merupakan pendapatan yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Lain – lain pendapatan asli daerah yang berasal dari pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjuakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan penerima jasa giro, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan atau bentuk lain akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.
2. Dana Perimbangan yang berasal dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana perimbangan antara lain :
- a) Dana Bagi Hasil yaitu dana bagi hasil yang bersumber dari pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri PPh Pasal 21,

dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam seperti: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- b) Dana Alokasi Umum yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal, (kebutuhan fiskal kapasitas fiskal daerah) dari alokasi dasar. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Porsi DAU antara provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi, kabupaten dan kota.
- c) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD, kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik daerah dan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.

3. Lain – Lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

b. Varian Pengeluaran

Varian pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari :

1. Varian Belanja Rutin

Anggaran belanja rutin disediakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat lancar, rutin dan secara terus menerus untuk menjaga kelemahan roda pemerintahan dan memelihara hasil – hasil pembangunan. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengelola daerah maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Meningkatnya belanja rutin yang diusulkan oleh setiap penganggaran harus diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan belanja rutin diupayakan menerapkan pendekatan anggaran kinerja, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisis dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh, anggaran belanja rutin meliputi belanja APBD, belanja kepala

daerah dan wakil kepala daerah, belanja sekretaris daerah dan perangkat lainnya.

2. Varian Belanja Pembangunan

Anggaran belanja pembangunan disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor industry, pertanian dan kehutanan, hokum, transportasi, dan lainnya (Abdul Halim.2004) dalam Among Makarti 2014.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penulis merangkum pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Coriyati (2019)	Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 - 2013	Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Variabel Independen: A. Rasio Kemandirian Keuangan daerah B. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah C. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah D. Rasio Belanja Modal E. Rasio Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah F. Rasio Pertumbuhan	1. Rasio kemandirian keuangan Kab. Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata – rata 4,26% dapat dikategorikan rendah sekali (dibawah 25 persen) 2. Rasio efektivitas keuangan Kab. Sarolangun selama tiga tahun anggaran rata – rata 102,2% dapat

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100%.</p> <p>3. Rata – rata rasio belanja operasi sebesar 66,77% dan rata- rata rasio belanja modal sebesar 27,12 %.</p> <p>4. Kab. Saloragon mengalami surplus anggaran dari tahun ketahun dan memiliki rata – rata rasio pengelolaan belanja sebesar 104,85%.</p>
2	Patria Ari Hanida Saragih (2017)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan, Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2014	<p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Independen: A. Rasio Kemandirian B. Rasio Efisiensi C. Rasio Keserasian D. Rasio Pertumbuhan</p>	<p>1. Kemandirian keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>2. Rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.</p> <p>3. Hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap</p>

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				variabel dependen.
3	Muhamad Zuhri & Ahmad Soleh (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR	<p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.</p> <p>Variabel Independen: A. Rasio Kemandirian B. Rasio Efektivitas C. Rasio Aktivitas D. Rasio Pertumbuhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian keuangan daerah kab. Kaur tergolong rendah sekali. 2. Rasio efektivitas PAD berjalan kurang efektif. 3. Rasio belanja operasi tergolong baik sedangkan Rasio belanja modal tergolong tidak baik. 4. Pertumbuhan PAD di Kab. Kaur pada tahun 2013 mengalami peningkatan dengan kategori sedang (32,86%) sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dengan kategori pertumbuhan tinggi (88,53%).
4	Ihsan Arief (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh.	<p>Variabel Dependen : Kinerja Keuangan</p> <p>Variabel Independen: A. Pendapatan Asli Kabupaten/Kota (PAK) B. Dana Alokasi Umum (DAU) C. Dana Otonomi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar 5% maupun 10%. 2. DAU memiliki pengaruh negative dan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Khusus D. Dana Bagi Hasil</p>	<p>tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar 5 % maupun 10%.</p> <p>3. Dana Otsus memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar 5% maupun 10%.</p> <p>4. DBH memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada tingkat toleransi sebesar 5%.</p>
5	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Variabel Independen: A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah B. Rasio Efektivitas C. Rasio keserasian D. Rasio Belanja Rutin terhadap APBD E. Rasio Belanja Modal terhadap APBD F. Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratios)</p>	Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih harus diperhatikan lagi pada aspek kemandirian dan aspek keserasian.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sugiyono (2014:60). Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk dapat memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka – angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.

Dalam hal ini kinerja keuangan diukur berdasarkan beberapa rasio antara lain rasio likuiditas, rasio kemandirian keuangan daerah, modal kerja, dan surplus/defisit. Beberapa rasio tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio likuiditas dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, walaupun pemerintah daerah telah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasar pada anggaran kas saja. Mahmudi (2016:109).

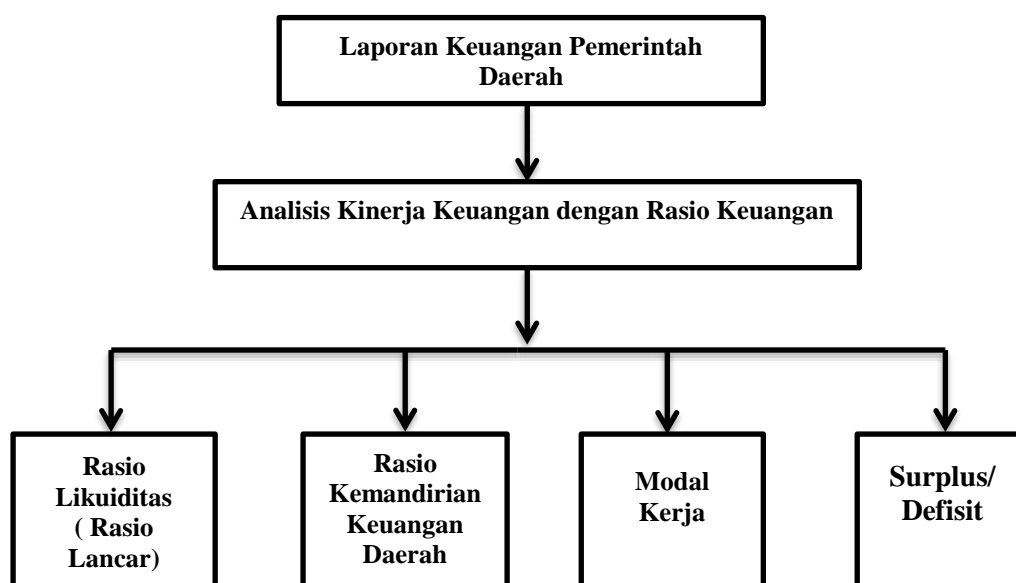
Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah maka dapat dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang memiliki tujuan untuk membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dan dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Mahmudi (2016:140).

Analisa modal kerja untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang ataupun penggunaan pos pembiayaan lainnya. Analisis modal kerja juga dapat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi kritis keuangan. Pemberian pinjaman biasanya diisyaratkan dengan kecukupan modal kerja, secara umum semakin tinggi modal kerja maka likuiditas terhadap organisasi semakin baik. Mahmudi (2016:107).

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran. Mahmudi (2016:75).

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang di tunjukkan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk atau generalisasi. Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka berupa laporan keuangan. Sugiyono (2012).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data berupa laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilakukan dengan cara observasi/riset secara langsung pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 kota Medan .

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian

N O	JENIS KEGIATAN	2019-2020																	
		Des'19			Jan'20			Feb'20			Mar'20			Mei'20			Juni'20		
1	Pengajuan Judul	■	■	■															
2	Penyusunan Proposal				■	■	■												
3	Perbaikan/ Acc Proposal							■	■	■									
4	Seminar Proposal										■								
5	Pengolahan Data										■	■	■						
6	Penyusunan Skripsi													■					
7	Bimbingan Skripsi																■		
8	Sidang Meja Hijau																		

Sumber: Penulis (2020)

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1) Data Sekunder

Data Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini jenis data kuantitatif secara *Time Series* selama 5 tahun dari tahun 2015 – 2019 yang diperoleh dari instansi terkait meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 - 2019.

2) Data Primer

Data Primer diperoleh dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah :

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan – Sumatera Utara.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel mendefinisikan secara operasional variabel yang akan diteliti. Tujuan operasional variabel untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan sebuah penelitian.

3.4.2. Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan metode pengukuran skala rasio. Adapun sifa- sifat skala rasio yaitu skala interval dan dapat diidentifikasi titik (0) mutlak, dan memungkinkan untuk menyatakan perbandingan atau rasio diantara kedua nilai. Adapun angka dari skala rasio menunjukkan nilai yang sebenarnya dari objek yang ditentukan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Rasio Likuiditas (X1)	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	<p>Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memnuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Lancar membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek, Nilai standar rasio lancar yang dianggap aman yaitu 2:1 tetapi nilai yang masih bisa diterima yaitu 1:1 .</p> <p>Mahmudi (2016:109)</p>	Rasio
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$	<p>Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemansirian keuangannya daerahnya.</p> <p>Mahmudi (2016:140).</p>	Rasio

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Modal Kerja (X3)	<i>Aset Lancar - Kewajiban Lancar</i>	Modal kerja berfungsi untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Mahmudi (2016:107).	Rasio
Surplus/Defisit (Y)	<i>Pendapatan Daerah - Belanja Daerah</i>	Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran. Sedangkan Defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran. Mahmudi (2016:75).	Rasio

Sumber: Penulis (2020)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah gambaran secara umum mengenai Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasi. Sedangkan data kuantitatif berupa laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari tahun 2015 – 2019.

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

- 1) Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan informasi melalui beberapa teori yang ditemukan lewat buku, literatur, dan jurnal sebagai sumber dasar teori untuk melengkapi proses penulisan ini.
- 2) Dokumentasi, dengan mengumpulkan data yang akan diteliti berupa laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 – 2019.

3.6. Teknik Analisa Data

Beberapa langkah – langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data berupa laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2015 – 2019.
- 2) Mendeskripsikan secara umum gambaran wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Menghitung kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara menggunakan rasio keuangan yang telah dirumuskan pada buku (Mahmudi : 2016) sebagai berikut:

(1) Rasio Likuiditas

$$a. \text{ Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

(2) Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$

(3) Modal kerja = Aset Lancar - Kewajiban Lancar

(4) Surplus/Defisit = Pendapatan Daerah - Belanja Daerah

(5) Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio kinerja keuangan masing – masing periode anggaran sesuai variabel.

- (6) Menarik kesimpulan atas rangkaian hasil analisis rasio dan informasi yang disajikan, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV

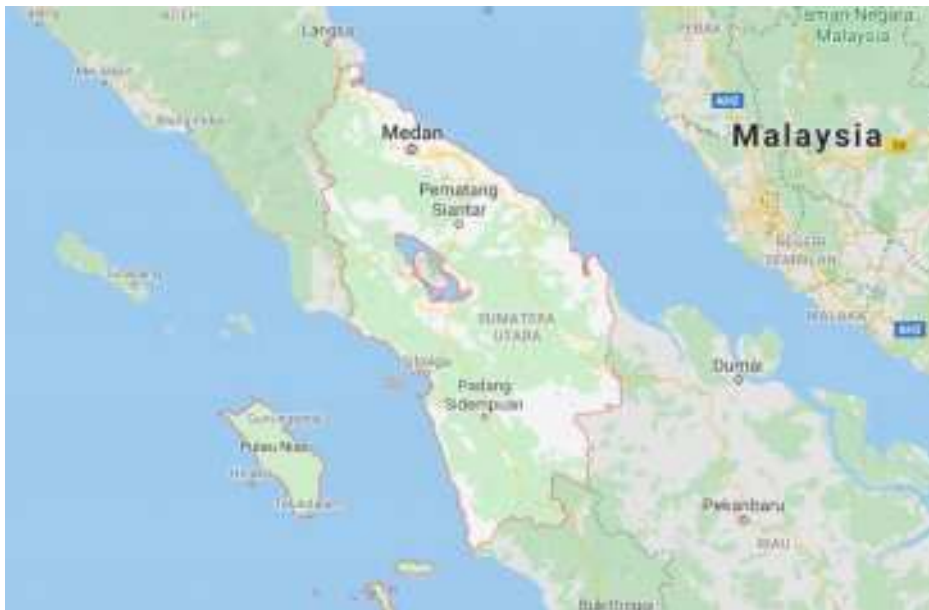
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi dan Karakteristik Wilayah

Sumatera Utara (disingkat Sumut) merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara Pulau Sumatera. Ibu kota provinsi Sumatera Utara adalah Medan. Luas wilayahnya 72.981 km². Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan pada tahun 2019 jumlah penduduknya sebesar 14.908.036 jiwa.

Gambar 4.1. Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber :<https://www.google.com/maps/place/Sumatera+Utara>, 2020.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatra Utara 72.981,23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- a. Pesisir Timur

- b. Pengunungan Bukit Barisan
- c. Pesisir Barat
- d. Kepulauan Nias

Pesisir Timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong – kantong konsentrasi penduduk. Daerah disekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan Bahasa Minangkabau.

Terdapat 419 pulau di provinsi Sumatera Utara. Pulau – pulau terluar adalah pulau Simuk (Kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Sumatra (Malaka). Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau – pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak dilepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli.

Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau – pulau lain di

Sumatra Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Humutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Sumatera Utara saat ini memiliki dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektare (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara *de jure* saja. Sebab secara *de facto*, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

Daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relative lebat disebabkan oleh intensitas udara yang lembab.

Pusat Pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks kresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh.

Sistem Pemerintahan Sumatera Utara saat ini di pimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta perangkat lainnya seperti Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gubernur pada periode ini di duduki oleh Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Edy Rahmayadi dan wakil Gubernur pada periode ini di duduki oleh Bapak Drs. H. Musa Rajekshah, M. Hum.

Jumlah satuan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 440 Kecamatan, 693 Kelurahan, 5.419 Desa.

Tabel 4.1
Daftar Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

No.	Kabupaten/kota	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (2017)	Kecamatan	Kelurahan /desa
1	Kabupaten Asahan	3.702,21	706.283	25	27/177
2	Kabupaten Batu Bara	922,20	400.803	7	10/141
3	Kabupaten Dairi	1.927,80	279.020	15	8/161
4	Kabupaten Deli Serdang	2.241,68	2.029.308	22	14/380
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	2.335,33	182.991	10	1/153
6	Kabupaten Karo	2.127,00	389.591	17	10/259
7	Kabupaten Labuhanbatu	2.156,02	462.191	9	23/75
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	3.596	313.884	5	2/52
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	3.570,98	351.097	8	8/82
10	Kabupaten Langkat	6.262,00	1.013.385	23	37/240
11	Kabupaten Mandailing Natal	6.134,00	430.894	23	27/380
12	Kabupaten Nias	1.842,51	136.115	10	-/170
13	Kabupaten Nias Barat	473,73	84.917	8	-/105
14	Kabupaten Nias Selatan	1.825,20	308.281	35	3/457
15	Kabupaten Nias Utara	1.202,78	133.897	11	1/112
16	Kabupaten Padang Lawas	3.892,74	258.003	12	1/303
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	3.918,05	252.589	9	2/386
18	Kabupaten Pakpak Bharat	1.218,30	45.516	8	-/52
19	Kabupaten Samosir	2.069,05	123.789	9	6/128
20	Kabupaten Serdang Bedagai	1.900,22	608.691	17	6/237
21	Kabupaten Simalungun	4.386,60	849.405	31	27/386
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	6.030,47	275.098	14	36/212
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	2.188,00	350.017	20	56/159
24	Kabupaten Tapanuli Utara	3.791,64	293.399	15	11/241
25	Kabupaten Toba Samosir	2.328,89	179.704	16	13/231
26	Kota Binjai	59,19	264.687	5	37/-
27	Kota Gunungsitoli	280,78	135.995	6	3/98
28	Kota Medan	265,10	2.210.624	21	151/-
29	KotaPadangsidempuan	114,66	209.796	6	37/42

No.	Kabupaten/kota	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk (2017)	Kecamatan	Kelurahan /desa
30	Kota Pematangsiantar	55,66	247.411	8	53/-
31	Kota Sibolga	41,31	86.519	4	17/-
32	Kota Tanjungbalai	107,83	167.012	6	31/-
33	Kota Tebing Tinggi	31,00	156.815	5	35/-

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara (2020)

1. Penduduk

Penduduk Provinsi Sumatera Utara berjumlah 11.890.399 jiwa, terdiri dari 5.942.682 laki – laki dan 5.947.717 perempuan, dengan kepadatan rata – rata 166 Jiwa/Km². Sekitar 56,75 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 43,25 % bertempat tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2007, penduduk Provinsi Sumatera Utara bertambah jumlahnya menjadi 12.834.371 jiwa yang terdiri dari 6.405.076 jiwa penduduk laki – laki atau sebesar 49,91 % dan 6.429.295 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 50,09 %, dengan kepadatan rata – rata 179 Jiwa/Km².

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 12,98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per km². Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2010 sebesar 1.10 persen. Sensus penduduk tahun 2015, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13. 937. 797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

Agama

Jumlah dan persentase menurut agama di daerah Sumatera Utara yang dianut yaitu meliputi : Islam sebanyak 7.530.839 jiwa atau 63,91 %, Katolik sebanyak 550.456 jiwa atau 5,41 %, Protestan sebanyak 3.062.965 jiwa atau 27,86 %, Hindu sebanyak 21.329 jiwa atau 0,19 %, Budha sebanyak 324.864 jiwa atau 2,82 %, Lainnya sebanyak 16.355 jiwa atau 0,14 %.

Suku Bangsa

Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, Melayu sebagai penduduk asli dilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang – orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau.

Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen, Suku Nias berada di kepulauan sebelah Barat. Sejak dibukanya perkebunan tembaku di Sumatera Timur, pemerintah Kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawad an Tionghoa. Ada juga etnis India (terutama Tamil) dan Arab yang beradu nasib di Sumatera Utara.

Berdasarkan Sensus tahun 2010, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah Batak, sudah termasuk semua sub suku Batak. Kemudia Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan Lainnya.

Jumlah dan persentase menurut suku/etnis asli daerah Sumatera Utara sebanyak 7 (tujuh) suku/etnis yaitu meliputi : – Melayu sebanyak 674.122 orang

atau 5,92 % – Karo sebanyak 585.173 orang atau 5,09 % – Simalungun sebanyak 234.515 orang atau 2,04 % – Tapanuli/Toba sebanyak 2.948.264 orang atau 25,62 % – Mandailing sebanyak 1.296.518 orang atau 11,27 % – Pakpak sebanyak 83.866 orang atau 0,73 % – Nias sebanyak 731.620 orang atau 6,36 % Sedangkan suku/etnis pendatang meliputi : – Jawa sebanyak 3.843.602 orang atau 33,40 % – Minang sebanyak 306.550 orang atau 2,66 % – Cina sebanyak 311.779 orang atau 3,07 % – Aceh sebanyak 111.686 orang atau 0,97 % – Lainnya (warga negara asing) sebanyak 379.113 orang atau 4,29 % .

Bahasa

Pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan Bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan Bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir Timur seperti wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodek, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai bahasa Melayu dialek “o” begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam.

Bahasa Melayu Asahan memiliki ciri khas yaitu pengucapan huruf R yang berbeda daripada Bahasa Melayu Deli contoh kata “cari” dibaca “caghi” dan kereta dibaca “kegheto”. Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek “e” yang sering juga disebut Bahasa Maya – maya. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan Bahasa Jawa sebagai pengantar sehari – hari.

Di Medan, orang Tionghoa lazim menuturkan Bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Orang India menuturkan bahasa Tamil dan Bahasa Punjab disamping bahasa Indonesia. Di pegunungan, masyarakat Batak menuturkan

bahasa Batak yang terbagi atas empat logat (Silindun-Samosir-Humbang-Toba). Suku Simalungun dan Mandailing juga menuturkan bahasa yang mirip dengan bahasa Batak Toba namun dengan ragam yang berbeda.

Suku Karo menuturkan Bahasa Karo yang dimana ragamnya berbeda dibandingkan bahasa Batak Tengah. Suku Pakpak juga memiliki bahasa yang hamper mirip dengan Suku Karo namun agak sedikit kasar. Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. Sedangkan orang – orang di pesisir Barat seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menggunakan bahasa Pesisir.

Pendidikan

Pada tahun 2005 jumlah anak yang putus sekolah di Sumut mencapai 1.238.437 orang, sementara jumlah siswa miskin mencapai 8.452.054 orang. Dari total APBD 2006 yang berjumlah Rp 2.204.084.729.000, untuk pendidikan sebesar Rp 139.744.257.000. termasuk dalam pos ini anggaran untuk bidang kebudayaan. Jumlah total kelulusan siswa yang ikut Ujian Nasional pada tahun 2005 mencapai 87,65 persen atau 335.342 siswa dari 382.587 siswa tingkat SMP/SMA/SMK sederajat peserta UN. Sedangkan 12,35 persen siswa yang tidak lulus itu berjumlah 47.245 siswa.

Peninggal Sejarah Provinsi Sumatra Utara

A. Benteng Jepang Batubara

Benteng Jepang Batubara, lokasinya terletak di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh. Meski hanya memiliki luas 4,8 x 2,6 meter, bangunan tua yang dimakan oleh zaman ini adalah pertahanan pertama bangsa Jepang ketika

melakukan ekspansi ke wilayah Sumatera Utara. Hal tersebut tentu menambah nilai sejarah dari keberadaan penjajah ke Sumatera Utara. Masyarakat di sekitar Pantai Parupuk lebih mengenal objek wisata ini dengan nama Lubang Jepang, keberadaannya yang terletak di tepi pantai Parupuk tentu anda sekaligus dapat menikmati panorama bahari kab Batubara yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka ini.

B. Benteng Putri Hijau

Benteng Putri Hijau terletak di Dusun XI, Kecamatan Deli Tua. Kalangan arkeolog menyebutkan, Benteng Putri Hijau dibangun dari tanah mengikuti topografi yang berdekatan dengan sungai dan memanfaatkan kontur tanah dengan kearifan lokal. Di benteng ini banyak di antara pengunjung yang berekreasi untuk mandi sambil menikmati segarnya air di bekas lokasi pemandian putri raja dari Kerajaan Aru di abad XVI dan XVII itu.

C. Biaro Bahal

Candi Bahal, Biaro Bahal, atau Candi Portibi adalah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portibi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yaitu sekitar 3 jam perjalanan dari Padangsidempuan atau berjarak sekitar 400 km dari Kota Medan.

Candi ini terbuat dari bahan bata merah dan diduga berasal dari sekitar abad ke-11 dan dikaitkan dengan Kerajaan Pannai, salah satu pelabuhan di pesisir Selat Malaka yang ditaklukan dan menjadi bagian dari mandala Sriwijaya. Memiliki Tiga bangunan kuno yaitu Biaro Bahal I, II dan III. Saling berhubungan dan terdiri dalam satu garis yang lurus. Biaro Bahal I yang terbesar. Kakinya

berhiasan papan-papan sekelilingnya yang berukiran tokoh yaksa yang berkepala hewan, yang sedang menari-nari.

Rupa-rupanya para penari itu memakai topeng hewani seperti pada upacara di Tibet. Di antara semua papan berhiasan itu ada ukiran singa yang duduk Di Bahal II pernah ditemukan sebuah Arca Heruka yaitu Arca Demonis yang mewujudkan tokoh pantheon Agama Buddha aliran Mahayanan, sekte bajrayana atau tantrayana. Heruka berdiri di atas jenazah dalam sikap menari; pada tangan kanannya ada tongkat. Bahal III berukiran hiasan daun. Candi ini diberi nama berdasarkan nama desa tempat bangunan ini berdiri. Selain itu nama Portibi dalam bahasa Batak berarti 'dunia' atau 'bumi' istilah serapan yang berasal dari bahasa sansekerta: Pertiwi (dewi Bumi).

Candi Portibi adalah peninggalan dari Kerajaan Hindu Panai yang memerintah sekitar tahun 1039.

D. Istana Maimun

Istana Maimun adalah istana Kesultanan Deli yang merupakan salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara, terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamsi, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun. Didesain oleh arsitek Italia dan dibangun oleh Sultan Deli, Sultan Mahmud Al Rasyid. Pembangunan istana ini dimulai dari 26 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 m² dan 30 ruangan. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan memiliki 3 bagian yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri dan bangunan sayap kanan. Bangunan istana ini menghadap ke utara dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Mashun atau yang lebih dikenal

dengan sebutan Masjid Raya Medan. Istana Maimun menjadi tujuan wisata bukan hanya karena usianya yang tua, namun juga desain interiornya yang unik, memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu, dengan gaya Islam, Spanyol, India dan Italia. Namun sayang, tempat wisata ini tidak bebas dari kawasan Pedagang kaki lima.

E. Makan Batu Raja Batak

Makam Batu Raja-Raja berupa makam dengan arsitektur yang unik berupa peti yang dipahat ataupun terlihat seperti sebuah tugu yang cukup besar. Terletak di pulau Samosir, pulau yang terdapat di tengah perairan Danau Toba ini merupakan pusatnya kebudayaan Batak sejak zaman Siraja Batak, yang merupakan nenek moyang dari etnis Batak hingga saat ini. Bahkan makam-makam tersebut mencerminkan ciri khas budaya Batak. Diantara makam-makam yang terdapat di Pulau Samosir, ada sebuah makam yang cukup populer karena merupakan makam dari seorang tokoh masyarakat Batak yang pernah berkuasa di sekitar Pulau Samosir, tepatnya di daerah Tomok. Makam tersebut adalah Makam Raja Sidabutar, yang kini telah dijadikan objek wisata sejarah di Tano Batak oleh Dinas Pariwisata. Menurut catatan sejarah, Raja Sidabutar adalah orang pertama yang bermukim di Tomok dari Gunung Pusuk Buhit, yang dikenal oleh masyarakat sebagai daerah asalnya nenek moyang etnis Batak.

2. Perekonomian

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda.

Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan juga terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan bijih dan peleburan aluminium yang merupakan satu – satunya di Asia Tenggara.

Sungai – sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik – titik panas geothermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energy panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energy listrik.

3. Pertanian dan Perkebunan

Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkebunan yang realnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV.

Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, the, kelapa sawit, kopi, cengkih, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan.

Luas pertanian padi pada tahun 2005 luas areal panen tinggal 807.302 hektare, atau turun sekitar 16.906 hektare dibanding luas tahun 2004 yang

mencapai 824.208 hektare. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hectare, dan tanaman padi lading menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hectare. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras didaerah ini.

Luas perkebunan karet. Tahun 2002 luas areal tanaman karet di Sumut 489.491 hektare dengan produksi 443.743 ton. Sementara tahun 2005, luas areal karet menurun atau tinggal 477.000 hektare dengan produksi yang juga anjlok menjadi hanya 392.000 ton. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 daerah irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 daerah irigasi mengalami kerusakan sangat kritis.

Produk pertanian di Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi cengkih, kelapa, kayu manis dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, dan Tapanuli Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatera Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas hortikultura (sayur – mayur dan buah – buahan); misalnya jeruk Medan, jambu Deli, sayur kol, tomat, kentang, dan wortel, yang dihasilkan oleh kabupaten Karo, simalungun dan Tapanuli Utara. Produk Holtikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

4. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antar

kabupaten maupun antar provinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai property untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain – lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan, untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatera Utara dibagi ke dalam empat wilayah pembangunan.

5. Nilai Budaya

Susunan masyarakat Sumatera Utara adalah berdasarkan geneologis teritorial seperti Batak Toba, Mandailing dan Nias. Sedangkan suku Melayu berdasarkan teritorial Bila ditinjau dari garis keturunan maka suku Batak dan Nias adalah patrilineal, sedang suku Melayu adalah parental (keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu). Pada masyarakat suku Batak, Nias maupun Melayu ada upacara adat siklus kehidupan dari lahir, masa dewasa sampai kematian, seperti upacara turun mandi, pemberian nama, potong rambut, mengasah gigi, perkawinan dan upacara pemakaman jenazah. Di masyarakat Batak dikenal upacara memberi makan oleh anak kepada orang yang lanjut usia (sulang-sulang). Terdapat juga upacara penggalian/pemindahan tulang belulang kesuatu tempat atau tugu yang disebut (mangongkal holi). Setiap upacara-upacara adat masyarakat Batak selalu disertai dengan pemberian Ulos dan tarian (Manortor).

6. Sumber Daya Manusia

Potensi unggulan daerah sumber daya alam Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah

sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain.

Luas areal perkebunan adalah 1.634.772 ha atau 22,73% dari luas Sumatera Utara dengan produksi sebesar \pm 3.738.516 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan 0,72 % pertahun dan pertumbuhan produksi sebesar 2,74 % pertahun. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75 %, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per Tahun dan baru dimanfaatkan 8,79 %.

Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah. Sumatera Utara juga merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) mempunyai 399 objek wisata yang tersebar di seluruh daerah. Dari 120 objek wisata yang dipasarkan meliputi potensi alam, seperti Danau Toba, Wisata Bahari terutama di Nias, Agro Wisata, Seni dan Budaya etnis yang masing-masing mempunyai nilai sendiri-sendiri. Komoditi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah dan sebagainya, juga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan Kawasan Agromarinepolitan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah Pulau sebanyak 419 buah (bernama 237 buah dan tidak bernama 182 buah) sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap kelautan dan perikanan,

ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia. Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di kawasan Pantai Barat mencapai 1.076.960 ton/Tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti Tuna, Tongkol, Cakalang, Kerapu, Kakap, Kembung, Tenggiri, Teri dan Ikan Hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79%). Potensi di Kawasan Pantai Timur mencapai 276.030 ton/Tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, Tuna, Tongkol, Cakalang, Kerapu, Kakap, Kembung, Tenggiri, Baronang, Teri dan Pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75%). Potensi Kepariwisata Bahari, banyak memiliki pantai yang indah seperti, Pantai Lagundri, Sorake, Pulau Pandan dan lainlain yang amat diminati oleh wisata Mancanegara untuk berselancar, diving dan lainlain. Potensi Bahan Tambang dan Galian yang cukup besar seperti Energi Panas Bumi, Timah Putih, Pasir Kuarsa, Kaolin dan Bauksit. Disamping itu, letak geografis Sumatera utara merupakan Kawasan Jalur Perdagangan Internasional sebab dekat dengan Selat Malaka (Malaysia) dan Singapura.

7. Transportasi

Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dari 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan provinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen.

8. Bandar Udara

Di Sumatera Utara terdapat 7 bandar udara, terdiri dari 1 bandar udara berstatus internasional dan 6 bandara domestik, seperti berikut ini :

- a. Bandar Udara Internasional Kualanamu
- b. Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing
- c. Bandar Udara Aek Godang
- d. Bandar Udara Binaka
- e. Bandar Udara Lasondre
- f. Bandar Udara Sibisa
- g. Bandar Udara Silangit

9. Ekspor & Impor

Kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US\$4,24 miliar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini.

Ekspor Kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi di Sumatera Utara juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US\$3,25 juta atau 47.2008,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

4.1.2. Hasil Analisis

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasar pada anggaran kas saja. Mahmudi (2016). Dalam hal ini Rasio Likuiditas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Lancar yaitu membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada laporan neraca dengan utang jangka pendek.

Nilai standar rasio lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut tidak mutlak tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Untuk nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1:1, jika kurang dari nilai yang ditentukan maka keuangan organisasi tidak lancar. Mahmudi (2016). Rasio Lancar dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 :

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Likuiditas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2015 -2019

Tahun	Aktiva Lancar	Utang Lancar	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$	Rasio Likuiditas
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	2:1 / 1:1
2015	178832306217983	164003940269578	1.09041469323256	1.09 : 1
2016	212587076448286	97127419576600	2.18874420194627	2.19 : 1

2017	270064031083484	97381824103304	2.77324884361374	2.77 : 1
2018	246890923949001	159870105778659	1.54432201534177	1.54 : 1
2019	193234595450531	48011006532597	4.02479784128947	4.02 : 1

Sumber: Data Diolah (2020)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Abdul Halim, 2012). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya seperti transfer pusat dan pinjaman.

Kemandirian daerah ditunjukkan besar kecilnya Rasio kemandirian yang digambarkan oleh ketergantungan terhadap sumber dana luar (eksternal) yaitu pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016). Rasio kemandirian dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintahan daerah dapat dilihat pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327 tahun 1996,
yaitu :

Tabel 4.3
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (diolah 2020)

Untuk mengetahui nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =</p> $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$
--

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pusat (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (100%)
2015	488388061930822	358279698261600	1489790572321	1.4
2016	495483310086900	525894007906900	53627584142262	1
2017	528746940150004	692813493991300	116770652683612	0.65
2018	563896057947897	705513442926600	84149652321022	0.71
2019	576127041205131	730064758824100	98116756143619	0.70

Sumber: Data Diolah (2020)

3. Modal Kerja

Agar dapat menganalisis modal kerja sumber informasi yang dibutuhkan adalah laporan neraca yang dimiliki pemerintah daerah. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, dana cadangan, ataupun pos pembiayaan lainnya.

Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas, hasil analisis modal kerja harus memberikan angka yang positif atau lebih dari Rp0. Untuk dapat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis keuangan maka dibutuhkan analisis modal kerja. Adapun pemberian pinjaman diisyaratkan dengan kecukupan modal kerja. Secara umum, semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik (Mahmudi, 2016). Analisis modal kerja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Hasil perhitungan Modal Kerja pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Perhitungan Modal Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Modal Kerja (Rp)
2015	178832306217983	164003940269578	14828365948405
2016	212587076448286	97127419576600	115459656871686

2017	270064031083484	97381824103304	172682206980180
2018	246890923949001.00	159870105778659	87020818170342
2019	193234595450531.00	48011006532597	145223588917934

Sumber: Data Diolah (2020)

4. Surplus/Defisit

Pengelolaan belanja meunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki ekuitas antar periode yang positif, belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, (Fidelius,2013).

Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit.Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran disebut dengan surplus. Sedangkan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran disebut dengan defisit (Mahmudi,2016).Surplus/Defisit dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Total Belanja Daerah}$$

Untuk mengetahui nilai surplus/defisit pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perhitungan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
2015	848075895297001	472872519154792	375203376142209
2016	10440618930401	9476423914544	964195015857
2017	12234837881539	12518868105165	(284030223626)
2018	12703058587890	12563387549665	139671038225
2019	13079598635469	13440442948917	(360844313448)

Sumber: Data Diolah (2020)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Rasio Likuiditas

Nilai yang diperoleh dari hasil akumulasi aktiva lancar dibagi dengan akumulasi utang lancar pada tabel 4.2 menggambarkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 masih lancar dengan nilai minimal 1.09 : 1. Namun jika dilihat pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2016 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan nilai rasio likuiditas yaitu 2.19 : 1. Besarnya nilai likuiditas dapat menggambarkan bahwa kondisi keuangan lancar jika dilihat dari rasio likuiditas sangat besar, seperti yang terjadi pada periode berikutnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 nilai rasio likuiditas berada pada nilai 2.77 : 1. Artinya disini kondisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tiga periode berturut mulai dari tahun 2015 hingga 2017. Namun pada tahun 2018 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan nilai rasio likuiditas sebesar 1.54 : 1. Rasio likuiditas meningkat dan menurun sekitar 50% pertahun dan itu menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini juga terjadi pada tahun 2019 dimana nilai rasio lancar berada pada nilai 4.02 : 1.

4.2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan setiap periode. Seperti pada tahun

2015 nilai rasio kemandirian sebesar 1.4 %, pada tahun 2016 sebesar 1 % terjadi penurunan sekitar 0,4 % dari tahun 2015 – 2016. Disusul pada periode berikutnya yaitu tahun 2017 terjadi penurunan 0,35 % dari nilai tahun sebelumnya menjadi 0,65 % , pada tahun 2018 nilai rasio kemandirian keuangan daerah berada pada angka 0,71 % dan pada tahun 2019 sebesar 0.70 %. Dengan membandingkan nilai rasio kemandirian dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri 1996, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah sekali.

4.2.3. Modal Kerja

Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun nilai modal kerja mengalami kenaikan dan penurunan (ketidakstabilan). Tahun 2015 nilai modal kerja sebesar Rp 14.828.365.948.405 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 97.127.419.576.600 maka nilai modal kerja sangat kecil. Pada tahun 2016 nilai modal kerja sebesar Rp 115.459.656.871.686 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 97.381.824.103.304 maka nilai modal kerja cukup besar pada periode itu, artinya kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang baik atas kondisi keuangannya.

Tahun 2017 nilai modal kerja sebesar Rp 172.682.206.980.180 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2018 Rp 159.870.105.778.659 yang mana pada saat itu nilai kewajiban lancar mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir, namun nilai modal kerja cukup besar pada periode tersebut. Pada tahun 2018 nilai modal kerja sebesar Rp 87.020.818.170.342 jika dibandingkan

dengan kewajiban lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 48.011.006.532.597 nilai modal kerja juga cukup besar pada periode tersebut.

Perbandingan periode diatas dapat dilihat bahwa nilai modal kerja cukup besar jika dibandingkan dengan nilai kewajiban lancar per periode, walaupun dapat diketahui bahwa setiap periode, mengalami kenaikan dan penurunan nilai modal kerja maupun kewajiban lancar. Dengan demikian untuk beberapa periode kondisi kinerja keuangan pemerintah cukup baik.

4.2.4. Surplus/Defisit

Berdasarkan perhitungan nilai surplus/defisit pada tabel 4.6 maka dapat dilihat terjadi penurunan disetiap periode dan bahkan mengalami selisih kurang (defisit) pada 2 tahun random yaitu tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2015 total pendapatan daerah lebih besar daripada total belanja daerah sehingga menghasilkan nilai surplus sebesar Rp 375.203.376.142.209.

Tahun 2016 pemerintah provinsi Sumatera Utara masih pada posisi surplus dengan nilai sebesar Rp 964.195.015.857 walaupun dapat diketahui nilai surplus pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan daerah namun rendah juga belanja daerah pada periode tersebut.

Tahun 2017 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami kondisi dimana selisih kurang (defisit) sebesar (Rp 284.030.223.626), meningkatnya pendapatan daerah pada tahun 2017 memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara pada saat itu, hal ini disebabkan oleh total belanja daerah yang lebih besar dari pada nilai total pendapatan daerah pada periode tersebut.

Namun pada tahun 2018 pemerintah provinsi Sumatera Utara kembali pada kondisi keuangan dengan nilai selisih lebih (surplus) yaitu sebesar Rp 139.671.038.225 namun jika dilihat pada periode sebelumnya maka nilai surplus pada tahun 2018 tetap mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena ketidakstabilan total pendapatan daerah dan total belanja daerah.

Ketidakstabilan tersebut memberi dampak negatif kembali pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2019, pemerintah provinsi Sumatera Utara kembali pada posisi selisih kurang (defisit) yaitu sebesar (Rp 360.844.313.448). Terjadinya selisih kurang (defisit) pada tahun 2019 disebabkan karena total belanja daerah lebih besar dari total pendapatan daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Nilai rasio likuiditas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015 – 2019 cukup tinggi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara mencapai nilai standar dan lancar.
2. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dari tahun 2015 – 2019 $< 25\%$ oleh sebab itu tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih rendah sekali.
3. Kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari modal kerja maka dapat dikatakan cukup baik, walaupun terjadi penurunan di tahun anggaran 2015.
4. Terjadi selisih kurang (defisit) pada tahun 2017 dan tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena lebih besar total belanja daerah dari total pendapatan daerah.

5.2. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk lebih mempertahankan nilai rasio likuiditas, agar kedepannya kinerja keuangan pemerintah lebih lancar dan mencapai nilai standar.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperluas pengelolaan Sumber Daya pada masing – masing daerah, sehingga dapat meminimalkan pendapatan dari transfer pusat, provinsi, dan pinjaman.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan untuk lebih memperhatikan arus kewajiban lancar pada setiap periode anggaran, agar nilai modal kerja dapat lebih besar sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan operasi rutin harian tanpa mencairkan dana cadangan lain.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar lebih mengawasi alur pengeluaran belanja daerah agar periode anggaran berikutnya tidak mengalami selisih kurang (defisit), atau pun lebih meningkatkan total pendapatan daerah guna menyeimbangkan total belanja daerah agar tidak terjadi defisit dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya yang ada pada daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Ihsan. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh*. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 2, Juli 2015.
- Aspan, H., Milanie, F., & Sari, A. K. The Effect of Public Participation, Transparency, and Accountability on the Efficiency of the Distribution of the School Operational Support Funds (BOS) in Tebing Tinggi City (Case Study of Taman Siswa College).
- Aspan, H. (2020). "The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia". International Journal of Research and Review (IJRR), Volume 7 Issue 6, pp 40-47.
- Aspan, H., E.S. Wahyuni, S. Effendy, S. Bahri, M.F. Rambe, dan F.B. Saksono. (2019). "The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: The Case of University Lecturers". International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume 8 No. 2S, pp. 412-416.
- Coriyati, (2019). *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2013*, Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol. 8, No. 01, April 2019.
- El Fikri, M., & Dewi Nurmasari Pane, R. A. (2020). Factors Affecting Readers' Satisfaction in "Waspada" Newspapers: Insight from Indonesia. Indexing and Abstracting.
- Fadly, Y. (2019). PERFORMA MAHASISWA AKUNTANSI DALAM IMPLEMENTASI ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) MEDAN. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 9(2), 190-201.
- Fidelius, (2013). *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah*, Jurnal EMBA, ISSN : 2303 – 1174, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal 2088 – 2096, Universitas Sam Ratulangi : Manado.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

- Malikhah, I. (2019). PENGARUH MUTU PELAYANAN, PEMAHAMAN SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR DAN SARANA PENDUKUNG TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI. JUMANT, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P., & Malikhah, I. (2021). IDENTIFIKASI STRATEGI KEBERHASILAN LAYANAN E-GOVERNMENT DI KOTA MEDAN. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 11(2), 38-45.
- Ritonga, H. M., Hasibuan, H. A., & Siahaan, A. P. U. (2017). Credit Assessment in Determining The Feasibility of Debtors Using Profile Matching. International Journal of Business and Management Invention, 6(1), 73079.
- RITONGA, H. M., PANE, D. N., & RAHMAH, C. A. A. (2020). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN EMOSIONAL TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA HONDA IDK 2 MEDAN. JUMANT, 12(2), 30-44.
- Ritonga, H. M., Setiawan, N., El Fikri, M., Pramono, C., Ritonga, M., Hakim, T., ... & Nasution, M. D. T. P. (2018). Rural Tourism Marketing Strategy And Swot Analysis: A Case Study Of Bandar PasirMandoge Sub-District In North Sumatera. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(9).
- Pramono, Joko. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. Among Makarti, Vol. 7 No.13.
- Saragih, Hanida Ari Patria. (2017). *Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, dan Rasio Pertumbuhan, Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2014*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Zelmiyanti, Riri. (2016). *Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)*. JRAK. Vol. 7 No.1 Hal 11-21.

Zuhri, Muhammad & Ahmad Soleh. (2016). *Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR*. Jurnal *Ekombis Review*. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.

Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jl. P. Diponegoro No.30 . Medan.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*

_____ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

_____ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1975 terdiri atas Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.

_____ Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.

_____ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____ Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

_____ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

_____ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah.

_____ Pasal 64 ayat (2) UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok
Pemerintah di Daerah.

_____ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 bentuk
APBD terbaru. Pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11).

_____ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah.

_____ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

_____ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

<https://www.google.com/maps/place/Sumatera+Utara,2020>. Diakses pada hari
Senin 01 Juni 2020, Pukul 22.21 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Utara. Diakses pada hari Selasa 19 Mei
2020, Pukul 13.00 WIB.

